



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Gedongkuning No. 146 Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta
Telepon: (0274) 378431, (0274) 378432
Laman : www.jogja.kemenkumham.go.id Surel : kanwiljogja@kemenkumham.go.id

BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 17 Januari 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Muji Hartono, SE, M.Ling
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang
Instansi : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

Nama : Ni Made Wulan, SH, M.H
Jabatan : Koordinator Perancang Zona Kabupaten Bantul
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya sebagai Pimpinan Rapat Harmonisasi,

Menyatakan:

1. bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Nomor: B/100.3.2/00166/HUKUM tanggal 9 Januari 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup RDTR Wilayah Perencanaan Pantai Selatan, yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dihadiri oleh:
 - a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham D. I Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - b. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul atau yang mewakili;
 - c. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul atau yang mewakili; dan
 - d. Tim Pengharmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang RDTR Wilayah Perencanaan Pantai Selatan.
2. bahwa telah dilakukan penyempurnaan substansi, rumusan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tersebut;

3. bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, putusan pengadilan dan 10 (sepuluh) dimensi pengharmonisasian; dan
4. bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 3 di atas, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Pemrakarsa,



Agus Muji Hartono, SE, M.Ling
NIP. 19720828 199303 1 008

Pimpinan Rapat Harmonisasi



Ni Made Wulan, SH., MH
NIP. 19830207 200801 2 004

Mengetahui,

a.n Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
ub Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah



Iswanti, S.Si., M.H
NIP. 19720818 199803 2 001